

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

“Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian berat menyangkut masa depan bangsa. Krisis politik, krisis moral yang disusul dengan krisis ekonomi masih berlangsung dan belum menampakkan gejala pulih dalam waktu dekat” (A. Azis, 1998). Krisis yang berkepanjangan tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti pertentangan politik, etnik, sosial budaya dan merebaknya sikap, perilaku permisif terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung lama. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme, supremasi hukum dan etika universal bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini persoalannya adalah bagaimana kondisi buruk ini dapat dibenahi dan berkembang menjadi peri kehidupan yang lebih baik melalui upaya mengakomodasi tuntutan perubahan dari masyarakat (Suprastowo, 1998).

Krisis multi dimensi yang berkepanjangan tersebut telah memicu kerusuhan demi kerusuhan di berbagai daerah di tanah air ini. Berbagai tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban yang secara syah memiliki monopoli atas perangkat kekerasan, melainkan telah pula dilakukan oleh masyarakat kebanyakan sampai pada masyarakat pedesaan, (Balitbang Depdikbud, 1999:1). Perbedaan-perbedaan Propinsial dan konflik horizontal cenderung meningkat dan pertarungan ideologi, kekuatan politik dan bahkan agama mulai mewarnai kehidupan masyarakat (A. Azis, 1998).

Dampak lanjutan krisis multi dimensi tersebut memunculkan pertanyaan besar menyangkut masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia serta kebudayaannya. Jika pembangunan berkelanjutan selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata berujung dengan kekerasan, intoleransi dan semangat membesar-besarkan perbedaan, maka kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang utuh dan masyarakat yang bersatu dimasa mendatang patut dipertanyakan. Jika persatuan bangsa dan kesatuan masyarakat sedang dalam persoalan serius, kebutuhan dan pengembangan budaya Indonesia pada akhirnya akan menjadi problem besar.

Balitbang Depdikbud (1999:2) mengindikasikan dua problem besar tersebut yaitu 1) masa depan kebudayaan nasional Indonesia dan 2) jaminan intergrasi bangsa yang menjadi landasan pengembangan kebudayaan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan sungguh-sungguh dari semua komponen bangsa terutama dari aparat pemerintah terkait. Kenyataan menunjukkan bahwa krisis yang tengah/masih dialami bangsa Indonesia telah menimbulkan gejala yang mengarah kepada disintegrasi, sepantasnya menyadarkan semua komponen bangsa agar selalu menempatkan intergrasi nasional sebagai prioritas utama dalam penanggulangan dampak krisis multi dimensi, selanjutnya terus diperkokoh melalui berbagai langkah penyadaran warga bangsa baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah sebagai agen pembaharuan.

Masa depan kebudayaan nasional Indonesia juga sedang dalam pertarungan ketika "citra budaya" yang pernah tertanam dengan baik tiba-tiba memunculkan hal

sebaliknya khususnya dalam situasi krisis ini. Bangsa Indonesia yang pernah dicitrakan sebagai “**bangsa yang ramah**” dan “**bangsa yang religius**” ternyata mencatat banyak peristiwa kekejaman dan pelanggaran hak azasi manusia, baik oleh negara maupun oleh masyarakat, penjarahan, pembakaran fasilitas umum, gedung sekolah, rumah ibadah, pelecehan hukum serta benturan fisik antar warga (A.Azis,1998).

Era keterbukaan dan globalisasi membawa peluang lebih besar kepada suatu bangsa untuk memperkenalkan kebudayaan kepada bangsa lain. Namun dipihak lain globalisasi dapat mengancam eksistensi budaya lokal karena budaya global dapat amat dominan karena ditransmisi melalui teknologi informasi yang dikuasi oleh bangsa-bangsa maju. Bahkan globalisasi dapat memunculkan agama baru yang disebut “*quasi religions*” (Suprastowo,1998; Belen,1998;Tilaar,1998)

Saat ini dunia pendidikan kita banyak disorot oleh berbagai sudut pandang, baik dari segi organisasinya, sistemnya, manajemennya, dan pendanaannya. Bank Dunia, (1998) melalui *Education in Indonesia : From Crisis to Recovery* dalam Dedi Supriadi dan Fasli Jalal (2001:153) mengidentifikasi paling sekita ada empat unsur utama yang menjadi permasalahan potensial terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu, 1) sistem organisasi yang kompleks pada tingkat Pendidikan Dasar, 2)manjemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP, 3)terpecah belah dan kakunya proses pembiayaan pada kedua jenjang tersebut, dan 4)manajemen pendidikan yang tidak efektif pada jenjang sekolah. Keempat faktor permasalahan pendidikan tersebut menjadi alasan

legal formal yang kuat bagi Pemerintah melaksanakan reformasi pendidikan dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Keberhasilan sekolah mencapai kinerja unggul tidak terlepas dari faktor informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berorientasi pada mutu, efisiensi dan kemandirian sekolah. Implementasi MBS didasarkan pada asumsi yang menekankan bahwa sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan dimana Kepala Sekolah dituntut bertanggung jawab atas keseluruhan komponen sekolah dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (*siswa*) maupun eksternal (*masyarakat*), pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja (*stakeholders*).

Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001:160) mengidentifikasi MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi bidang pendidikan. Sebagai wujud reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, (2001:61) menambahkan bahwa dalam MBS Kepala Sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas Pemerintah.

Selain alasan normatif, secara empirik manajemen berbasis sekolah memang perlu diterapkan karena menurut Slamet PH (2000:607) di lapangan menunjukkan kenyataan paling sekiranya ada empat alasan utama perlu diterapkannya MBS yaitu :
Pertama ; Manajemen sentralistik yang selama ini dipraktekkan memiliki banyak

kelemahan antara lain keputusan pusat sering kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah; administrasi berlebihan yang dikarenakan lapis-lapis birokrasi yang terlalu banyak telah menyebabkan kelambanan dalam menangani setiap permasalahan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah; dalam kenyataannya administrasi telah mengendalikan kreasi; proses pendidikan dijalankan dengan *undermanaged* sehingga menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah telah menempatkan sekolah pada posisi yang marginal, sehingga sekolah tidak berdaya, tidak memiliki keberanian moral untuk berinisiatif; sekolah tidak mandiri; terjadi penyumbatan dan bahkan pemasungan demokrasi; sekolah tidak peka dan tidak jeli menangkap dan mengungkap permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi pendidikan dari masyarakat. Manajemen berbasis pusat yang ada selama ini tidak saja menumpulkan daya kreativitas sekolah, tetapi juga mengikis habis rasa kepemilikan warga sekolah terhadap sekolahnya. **Kedua** : Sekolah paling memahami permasalahan di sekolahnya. Karena itu sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang dibuat “sedekat” mungkin dan se-cocok mungkin dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu sekolah harus memiliki kewenangan (*otonomi*), tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi juga dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah. **Ketiga** : Perubahan disekolah akan terjadi jika semua warga sekolah ada “rasa memiliki” (*sense of belonging*) “romongso handar benni, wajib melu hangrung kebi, mulat saliro hangrosowani” artinya ada rasa memiliki yaitu rasa memiliki sekolah yang melaksanakan model pendidikan IPS

berorientasi lingkungan, ada rasa tanggung jawab yaitu bertanggung jawab akan adanya sekolah yang melaksanakan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan, ada rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial yang tinggi yaitu rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial yang tinggi kepada sekolah yang melaksanakan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan.

Rasa memiliki itu pada dasarnya berasal dari kesempatan berpartisipasi dalam merumuskan perubahan dan keluwesan untuk mengadaptasinya terhadap kebutuhan individu sekolah. Rasa memiliki pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi akan menciptakan rasa solidaritas sosial dan kepekaan sosial yang tinggi pula. Makin besar tingkat partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan, makin besar rasa memiliki sekolah dan makin besar pula rasa tanggung jawabnya. Yang berarti bahwa perubahan lebih disebabkan oleh dorongan internal sekolah dari pada tekanan dari luar sekolah.

Keempat : Telah lama pengaturan yang bersifat birokratik lebih dominan dari pada tanggung jawab profesional, sehingga kreativitas sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya terpasung dan bahkan terbunuh. Tidak jarang pula dijumpai bahwa formalitas sering jauh melampaui hakiki. Yang lebih parah lagi guru-guru kehilangan "jiwa kependidikannya". Mendidik tidak lebih dari sekedar pengenalan nilai-nilai yang hasilnya hanya berupa pengetahuan nilai (*logos*) dan belum sampai pada penghayatan (*etos*) apalagi sampai pada pengamalannya. Akibatnya menurut Aburizal Bakrie (1999) proses belajar mengajar di sekolah lebih mementingkan jawaban baku yang dianggap benar oleh guru, dibandingkan daya kreasi, nalar dan eksperimentasi

peserta didik untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak ada keterbukaan dan demokrasi. Tidak ada toleransi pada kekeliruan akibat kreativitas berpikir, karena yang benar apa yang dipersepsikan benar oleh guru, sehingga yang terjadi adalah memorisasi dan "*recall*" dan tidak dihargainya kreativitas dan kemampuan peserta didik. Padahal pendidikan yang sebenarnya lebih mementingkan proses "*pencarian jawaban*" dibandingkan "*memiliki jawaban*" (Slamet.PH, 2000:608).

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi pendidikan masa kini dan masa mendatang, pendekatan pendidikan yang sentralistis perlu ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pengembangan ide dan kreativitas serta potensi lingkungan agar memperoleh output dan outcome yang mampu bersaing secara kompetitif dengan sekolah lain, dengan daerah lain, dan bahkan dengan bangsa lain. Dengan kata lain pendekatan pengelolaan sumberdaya pendidikan perlu diubah, ditata, dan diperbaharui kearah penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan dengan menerapkan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS. Namun perlu pula diwaspadai bahwa desentralisasi pendidikan yang terbuka melalui wadahnya otonomi daerah jangan sampai kebablasan yang dapat membuat pendidikan di daerah, atau orang-orang daerah bersikap antipati pada daerah lain yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Karena itu sikap yang sangat mementingkan orang daerah sendiri tanpa mempedulikan orang dari daerah lain perlu dieliminir sedini mungkin.



Pemikiran ulang (*rethinking*) dan pengkajian ulang (*redesigning*)

aspek-aspek fundamental beroperasinya suatu lembaga sekolah yang lebih dikenal sebagai proses *restructuring* atau systems reform seperti itu telah dikembangkan oleh berbagai kalangan (Fiskel,1995). Salah satu pendekatan yang mengalihkan sentralisasi menjadi desentralisasi yang telah diterapkan adalah pengembangan sekolah melalui Manajemen Berbasis sekolah. Dengan demikian konsep MBS adalah berpindahnya kontrol kebijakan dan pengambilan keputusan dari pusat ke daerah, sehingga sekolah mempunyai kewenangan yang otonom dalam meningkatkan prestasi belajar.

Pelaksanaan MBS akan muncul dalam berbagai bidang, namun intinya adalah ide-ide partisipatif pengambilan keputusan yang berasal dari sekolah. (David,1996:6) MBS juga merupakan harapan terjadinya perubahan terhadap peranan Kepala Sekolah, terutama orang-orang yang berhubungan dengan masalah, isu, dan situasi termasuk dalam proses pengambilan keputusan. (Goodman,1994)

Dengan berlukunya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta PP No.25 tahun 2000 tentang "Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom" merupakan dasar legal bagi pemberian kewenangan kepada daerah Kabupaten dan Kota untuk mengelola pembangunan sektor publik, khususnya sektor pendidikan. Oleh karena itu gagasan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan sekolah. **Kriteria efisiensi dan efektivitas** pengelolaan pendidikan dilandasi asumsi bahwa perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan yang nyata

ditingkat lokal sekolah menjadikan alokasi sumber daya pendidikan tepat sasaran, sehingga memperkecil terjadinya kesalahan dalam alokasi sumber daya pendidikan.

Pengelolaan pendidikan berbasis sekolah tampaknya cukup menjanjikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah, serta menjawab tantangan dan kebutuhan daerah dan bangsa dimasa datang. Aspek-aspek pengelolaan berbasis sekolah yang mengarah pada pendayagunaan sumberdaya pendidikan sekolah perlu dikembangkan dan dijadikan model pendidikan berorientasi lingkungan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah.

Penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilakukan secara "*birokratik-sentralistik*", telah menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang memiliki jalur yang sangat panjang dan seringkali kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah setempat. Sebagai akibat keputusan birokrasi yang melalui jalur yang sangat panjang itu, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan. Jalur birokrasi yang panjang itu juga telah memisahkan mata rantai kewenangan daerah untuk mampu mengatasi berbagai permasalahan konflik sosial di daerah, baik konflik di tingkat sekolah maupun konflik yang terjadi secara propinsial. Sekolah sebagai agen perubahan dan agen pembaharuan berpotensi mengatasi berbagai fenomena sosial yang serba kompleks tersebut belum terakumulasikan. Oleh karena itu model pendidikan IPS berorientasi lingkungan ini ingin memantapkan potensi dan jati diri



sekolah sebagai agen perubahan dan sebagai agen pembaharuan demi kemajuan bangsa dimasa mendatang.

Disisi lain peranserta masyarakat, khususnya orang tua murid dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini dirasakan relatif sangat minim. Partisipasi masyarakat yang ada selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (*dana*), bukan pada proses pendidikan seperti (*pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas*). Akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua murid sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan (*stakeholder*). Sebagai konsekuensi pelaksanaan keputusan birokrasi yang melalui jalur yang sangat panjang dan minimnya peranserta masyarakat dalam bidang pendidikan, berakibat pada rendahnya mutu pendidikan sekolah.

Model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berpotensi melahirkan nilai-nilai luhur yang patut dikembangkan dalam diri kepribadian peserta didik kedalam proses pendidikan dalam bentuk aturan tingkah laku, hubungan sosial antar manusia, antar peserta didik, dan antar peserta didik dengan pendidik, sangat perlu dalam rangka menciptakan budaya damai (*culture of peace*) Fuad Hasan,(2000) dengan saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya tanpa membedakan suku, agama dan warna kulit. Melalui pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS, diharapkan pendidikan IPS dapat membentuk perilaku terpuji, sikap terhormat dan pribadi bertanggung jawab yang **mampu memecahkan masalah-masalah sosial dan konflik sosial** yang kerap kali terjadi dilingkungannya.

Mampu menerima perbedaan (pendapat, pikiran, kelompok, golongan dan etnis), serta mampu menyikapi perbedaan itu menjadi wahana kekayaan budaya bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dalam rangka mewujudkan negara kesatuan yang kokoh dan harmonis.

Dalam kurikulum 1994 dikatakan bahwa "Pendidikan IPS bertujuan membentuk pengetahuan, sikap, nilai, dan moral, serta keterampilan siswa sebagai bekal untuk memahami lingkungan masyarakat sekitar dan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi". Sumantri (1996:21) mengindikasikan pendidikan IPS pada dasarnya adalah untuk menanamkan pengetahuan awal dan sebagai media pelatihan warga negara sedini mungkin bagi siswa. Barr (1978) menambahkan bahwa melalui pendidikan IPS diharapkan akan terbentuk dan lahir warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta mampu memainkan peranan positif dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia yang global.

Menyadari begitu pentingnya esensi dan misi yang diemban pendidikan IPS tersebut, maka hendaknya pendidikan IPS mampu mengkondisikan dan mengembangkan segala potensi diri siswa secara optimal (Hamid Hasan, 1996:121). Pendidikan IPS sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, diharapkan mampu mengembangkan serta menanamkan kemampuan dan keterampilan kepada siswa secara optimal, yang pada akhirnya diharapkan mampu membentuk warga negara yang baik (Barr, 1978) sebagaimana yang di amanatkan dalam kurikulum 1994. Oleh sebab itu guru sebagai pelaksana dan pengembang pendidikan di sekolah hendaknya

memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam memilih pendekatan dan metoda pembelajaran yang digunakan (Kosasih,1994:43) sehingga pembelajaran mampu mendorong pengembangan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa secara signifikan.

Analisis empiris masa lalu menunjukkan, bahwa model pendidikan IPS belum memenuhi harapan ideal dan esensi dasar yang di emban pendidikan IPS. Indikasi tersebut dapat diketahui bahwa melalui model pendidikan IPS yang masih berorientasi pada proses transferring pengetahuan belaka tanpa memperhatikan pembentukan nilai moral yang mesti harus ditanamkan. Pendidikan IPS yang ada selama ini cenderung berpusat pada guru (*teacher centered*), yang cenderung hanya memindahkan sejumlah konsep dan informasi dari guru kepada siswa. Pada evaluasinya, guru hanya mengevaluasi hal-hal yang telah diberikan, tanpa berusaha mengembangkan fakta, konsep, generalisasi dan teori yang dapat memberikan kontribusi positif dan nilai tambah bagi pendidikan IPS.

Pola pendidikan IPS seperti disebutkan di atas, menyebabkan interaksi belajar mengajar IPS bersifat statis, sehingga komunikasi cenderung hanya berlangsung sepihak dari guru ke siswa. Iklim pendidikan yang demikian ditinjau dari konsepsi dan orientasi dasar model pendidikan IPS berorientasi lingkungan kurang adanya keterpaduan antara harapan dengan kenyataan di lapangan. Permasalahan ini terjadi karena pendidikan IPS yang ada selama ini masih bersifat : (1) kurang merangsang dan membudayakan siswa belajar, (2) kurang mendukung pengembangan dan pelatihan keterampilan berpikir siswa, (3) pengorganisasian

materi pelajaran hanya bersifat "*textbook oriented*", dan (4) cenderung mematkan kreativitas serta produktivitas siswa dan bertolak belakang dengan tujuan dan misi yang diemban oleh pendidikan IPS (Shaver,1998:224 ; NCSS,1997;Sumantri (2001).

Menyadari peran kritis yang diemban pendidikan IPS tersebut, maka salah satu solusi dan alternatif pemecahannya adalah dengan melaksanakan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS.

Secara eksplisit konsep model pendidikan IPS berorientasi lingkungan telah tersirat dalam kurikulum IPS 1994, namun kondisi di lapangan menunjukkan belum memungkinkan guru untuk melaksanakannya secara formal karena kurikulum pendidikan yang ada bersifat sentralistis. Kepala Sekolah dan guru takut dituduh menyimpang dari ketentuan, target-kurikulum tidak tercapai dan berbagai alasan inkonstitusional lainnya. Disadari bahwa peran pendidikan IPS sebagai wahana pembentuk sikap, perilaku dan warga negara yang baik telah lama lahir kepermukaan ebelum munculnya istilah MBS. Namun dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi pendidikan seperti sekarang ini, maka selayaknya model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS lebih diutamakan.

Pengelolaan kelembagaan sekolah dalam desentralisasi pendidikan menurut Bovin (1998:181) terdapat sejumlah komponen yang perlu diperhatikan dalam praktek pendidikan yaitu : (1)memberdayakan sumber daya manusia seoptimal mungkin,(2)memfasilitasi warga sekolah untuk belajar terus dan belajar, (3) mendorong kemandirian (*otonomi*) setiap warga sekolah, (4) memberikan tanggung jawab kepada warga sekolah, (5) mendorong setiap warga sekolah bertanggung jawab

(*accountability*) terhadap hasil kerjanya, (6) mendorong adanya *teamwork* yang kompak, cerdas dan sarat nilai bagi setiap warganya, (7) merespon cepat pasar pelanggan, (8) mengajak warga untuk menjadikan sekolahnya sebagai *customer focused*, (9) mengajak warga siap menghadapi perubahan, (10) mendorong warga berpikir sistem, (11) mengajak warga komitmen terhadap keunggulan kualitas, (12) mengajak warga melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan (13) melibatkan warga dalam pelaksanaan manajemen sekolah.

Kondisi pendidikan IPS tersebut di atas perlu dicarikan solusinya sedini mungkin, agar pendidikan IPS kembali pada “fitrahnya” sebagai media strategis pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk itu maka penelitian ini memfokuskan diri pada upaya pengembangan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS pada SLTP dan SMU negeri MBS di Propinsi Kalimantan Barat.

Dipilihnya pendekatan ini, karena model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berperan sebagai bentuk yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif, yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas 2000). Dengan memiliki otonomi yang besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar pula mengelola sekolahnya, sekolah lebih berdayaguna dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Pengambilan keputusan partisipatif yaitu melibatkan warga sekolah

secara langsung dalam mengambil keputusan, sehingga rasa memiliki sekolahnya (*sense of belonging*) akan meningkatkan rasa tanggungjawab (*akuntabilitas*) serta akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini perkembangan pendidikan IPS di Kalimantan Barat bersifat statis bahkan mengalami jalan ditempat walaupun tidak ingin disebut sebagai kemunduran. Statisnya pendidikan IPS tersebut, diasumsikan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah belum berfungsinya model pembelajaran yang diharapkan. Lambannya perkembangan pendidikan IPS tersebut dapat diidentifikasi melalui Nilai Ebtanas Murni (NEM) IPS setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan barat dalam lima tahun terakhir ini, baik tingkat SD, SLTP sampai tingkat SMU seperti terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel : 1
RATA-RATA NEM SLTP DAN SMU
DI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN	SLTP	SMU		
		IPA	IPS	BAHASA
1	2	3	4	5
1996/1997	4,66	4,80	4,04	4,55
1997/1998	4,87	4,15	4,06	4,37
1998/1999	4,48	4,14	3,98	4,57
1999/2000	5,25	4,00	3,79	4,28
2000/2001	4,94	4,26	3,90	4,26

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat 2001

Disamping permasalahan NEM yang cenderung menurun dalam kurun waktu tersebut, seringkali terjadi konflik sosial yang berujung pada kerusuhan etnis,

kurangnya sikap kebersamaan, terkikisnya perilaku terpuji, degradasinya moral religius dan ideologis kebangsaan terusik oleh berbagai faktor. Diantaranya seperti tawuran antar pelajar/sekolah, pelecehan seksual, ditemukannya oknum berseragam sekolah oleh aparat keamanan ditempat-tempat terlarang (diskotik, hiburan malam) dan sebagainya, dan yang lebih parah lagi adalah terjadinya kerusuhan sosial yang bermula dari pertikaian etnis yang tak terkendali.

Permasalahan pendidikan IPS diatas, tidak saja menyebabkan pendidikan IPS cenderung statis, tetapi juga telah menciptakan kepedaran rasa persatuan dan kesatuan hidup berdampingan secara damai pada setiap diri siswa. Hal ini perlu dicarikan solusinya, salah satu caranya adalah melalui penelitian model pendidikan IPS berorientasi lingkungan agar peristiwa bersejarah berupa konflik sosial, konflik etnis konflik politik, tawuran antar pelajar dan berbagai fenomena sosial dan peristiwa bersejarah dimasa lalu tidak terulang kembali.

Pendidikan IPS berorientasi lingkungan, akan memberikan jawaban mengenai masalah konflik sosial, menurunnya sikap kebersamaan, memudarnya perilaku terpuji, degradasi moral religius dan ideologis kebangsaan. Pendidikan IPS berorientasi lingkungan juga bertujuan memberikan pengelolaan otonomi luas kepada sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan diterapkannya pendidikan IPS berorientasi lingkungan, dimaksudkan agar : 1)Kepala Sekolah memiliki otonomi luas dalam mengelola sekolah dan mengalokasikan sumber daya sekolah, 2)Kepala sekolah memiliki keterampilan mengelola sekolah dengan baik, 3)Memperbesar peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah, dan bertujuan agar ;

a)Tercapainya efisiensi pengelolaan pendidikan yang diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi, b)Meningkatkan mutu pendidikan, yang diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas serta peningkatan profesionalisme guru dan Kepala Sekolah, c)Meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui peran serta orang tua murid dalam penyusunan dan pengawasan program sekolah (Depdiknas,2001)

Berdasarkan unsur-unsur dan mekanisme kerja sekolah MBS, sangat memungkinkan sekolah melaksanakan kebijakan-kebijakkan sekolah, merespon dan menggali harapan-harapan masyarakat bagi kemajuan sekolah. Dalam hal ini maka jawabannya adalah untuk memperbaiki mutu sekolah meningkatkan NEM IPS serta menanamkan sikap kesetiakawanan sosial yang tinggi seperti disebutkan diatas salah satu caranya adalah dengan melaksanakan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS. Berkenaan dengan itu penelitian ini memfokuskan diri pada sekolah SLTP dan SMU Negeri MBS.

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Model Pendidikan IPS Berorientasi Lingkungan Berdasarkan Konsep MBS Pada SLTP dan SMU Negeri MBS di Propinsi Kalimantan Barat ?”.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pengungkapan permasalahan ini adalah menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai aspek

pembangunan kebudayaan nasional melalui penciptaan kebersamaan hidup berdampingan secara damai (*learning to live together*) diantara siswa sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara agar berbagai fenomena sosial, dan konflik sosial yang memilukan dimasa lalu seperti pertikaian etnis, pertentangan kelompok, suku, agama, golongan dan sebagainya tidak terulang kembali.

Sekolah sebagai agen perubahan berpotensi memberikan tanggung jawab untuk melakukan perubahan ke dalam pola perilaku seseorang sebagai sistem sosial yang normatif. Sekolah sebagai agen perubahan harus selalu siap berperan melaksanakan fungsinya di dalam situasi kerja, karena perubahan itu sendiri diperlukan sebagai alat dalam rangka memecahkan permasalahan yang bertujuan kearah kondisi atau keadaan yang lebih baik.(Wahjosumidjo 2001:166) Proses perubahan para siswa sebagai peserta didik kearah manusia cerdas, yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, terjadi secara berjenjang mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah (Pelly 1994 : 62). Oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi bagi kaum pendidik menanamkan nilai-nilai moral, sikap terpuji, dan perilaku terhormat kepada siswa, agar dimasa datang tercipta bangsa yang beradab dan cinta damai.

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dimana terjadi proses belajar yaitu proses pembudayaan manusia dalam arti diselenggarakannya penanaman dan pembinaan terhadap : 1) nilai-nilai moral, mental dan spiritual; 2) ketajaman penalaran atau intelektual; 3) membina dan menyalurkan minat, bakat, dan keterampilan; 4) peningkatan wawasan (Wahjosumidjo 2001:182). Proses belajar mengajar tersebut

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor suasana, sarana dan fasilitas, sikap dan sumber daya manusia dan faktor lingkungan.

Atas dasar fenomena diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini diformulasikan kedalam bentuk-bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Model pendidikan PIPS yang bagaimanakah yang dapat menumbuhkan kecintaan akan sikap kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, penghargaan atas perbedaan serta nilai-nilai budaya lokal sebagai aspek pembangunan kebudayaan nasional ?
2. Bagaimanakah keikutsertaan masyarakat, dan peranserta Pemerintah dalam upaya implementasi model pendidikan IPS berorientasi lingkungan ?
3. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi pengembangan dan implementasi model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS. Secara rinci studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa aspek yang berkaitan dengan pengembangan model pendidikan IPS yang berorientasi lingkungan serta efektivitasnya dalam membina kerukunan hidup berdampingan secara damai, mampu menghargai perbedaan budaya (*culture*) dan mampu membuat perbedaan budaya itu menjadi keragaman budaya yang perlu dilestarikan guna membentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh yang meliputi :

1. Mendapatkan model pendidikan IPS yang dapat menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai aspek pembangunan kebudayaan nasional yang menyangkut: 1) Hak asasi manusia, (demokrasi dan keadilan) 2) Etika, estetika dan moral, 3) Persatuan dan kesatuan bangsa, (intergrasi), 4) Ilmu pengetahuan dan teknologi, 5) Etos kerja, f) Masyarakat madani, g) Bahasa dan sastra, h) Kesehatan dan olahraga (Depdiknas, 1999:8)
2. Mendapatkan model keikutsertaan masyarakat dan peranserta Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berorientasi lingkungan, untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah disintergrasi bangsa
3. Mendapatkan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan untuk menciptakan hidup berdampingan secara damai diantara sesama siswa, sesama anggota masyarakat, meningkatkan intensitas kebersamaan serta sikap saling menghargai.
4. Mengetahui signifikansi peranan pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS terhadap penciptaan kebersamaan hidup berdampingan secara damai.

E. Manfaat Penelitian

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam menyelenggarakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan IPS di sekolah pada khususnya. Secara deskriptif manfaat penelitian ini di formulasikan sebagai berikut :



1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengukur sejauhmana kontribusi model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS dapat berfungsi meningkatkan kualitas kebersamaan hidup berdampingan secara damai, penghargaan akan nilai-nilai budaya, dan menghargai perbedaan.
2. Bagi Kepala Sekolah dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi penggunaan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan dapat memberikan sumbangan bagi penciptaan suasana kebersamaan antara sesama warga sekolah, antara sekolah dengan masyarakat, untuk menunjang keberhasilan kegiatan belajar-mengajar bagi terciptanya suasana lingkungan belajar yang menyenangkan.
3. Bagi guru umumnya dan guru IPS khususnya dapat dijadikan bahan introspeksi diri untuk mengukur sejauhmana aktivitas belajar mengajar yang telah dilakukan dalam pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang berorientasi budaya lingkungan guna memelihara dan menumbuhkan rasa kesetiakawan sosial nasional
4. Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan untuk melestarikan dan mengembangkan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS guna meningkatkan kualitas kebersamaan hidup berdampingan secara damai, mampu dan mau menghargai perbedaan, mampu dan mau menghargai budaya daerah yang bertumpu pada kebudayaan nasional serta dapat

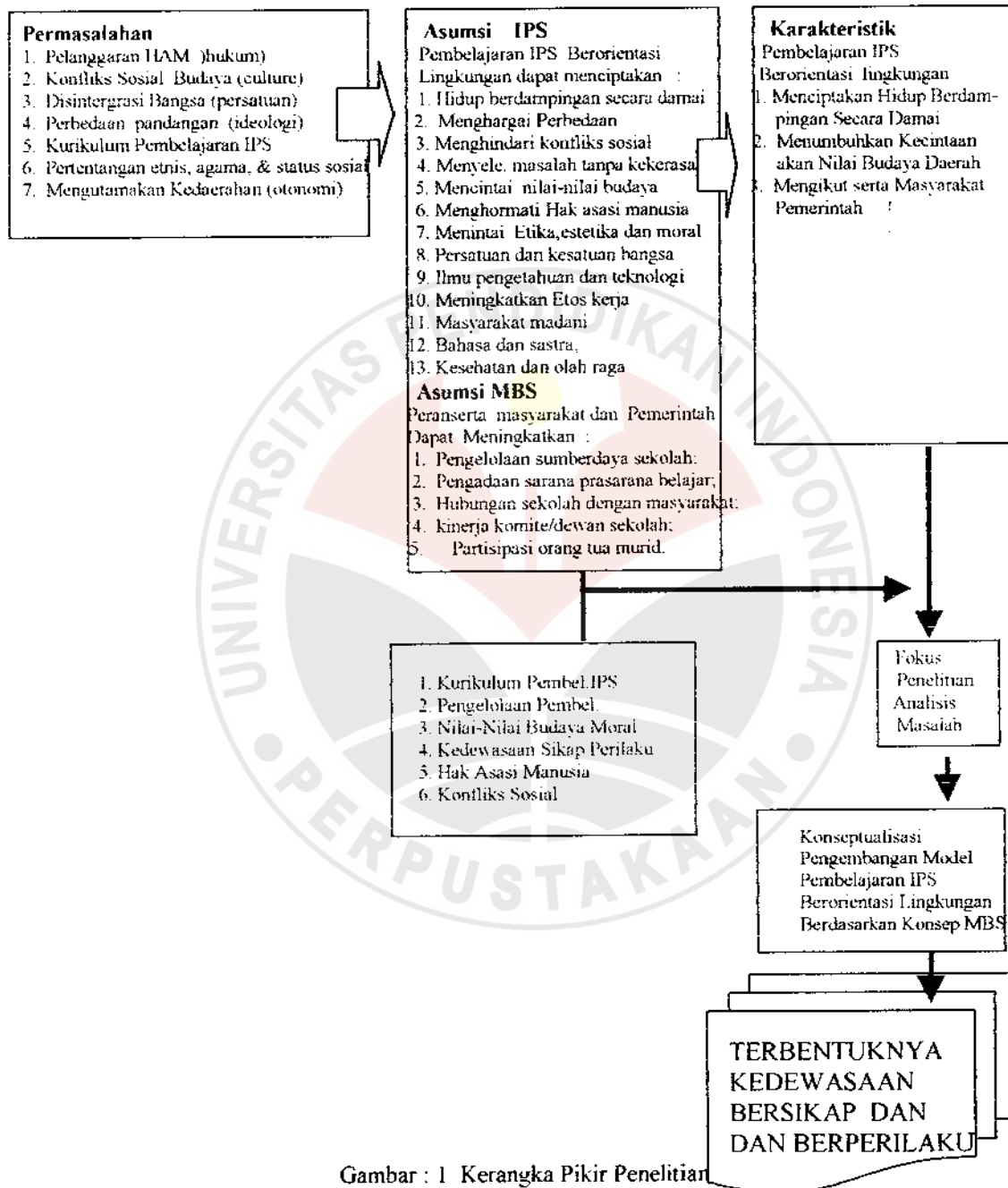
memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi di lingkungan masyarakat tanpa melakukan kekerasan.

5. Memberikan arahan dan pijakan bagi para peneliti lanjut untuk lebih memperdalam serta memperkaya konsep model pendidikan IPS berorientasi lingkungan guna perluasan dan pengembangan kreasi sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan daerah.



F. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan memahami alur pikiran mengenai langkah-langkah penelitian ini, dibuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar : 1 Kerangka Pikir Penelitian

G. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (G. Ritzer, 1967:264). Paradigma adalah suatu pandangan, suatu perspektif umum atau cara untuk memilah-milah dunia nyata yang kompleks, kemudian memberikan arti dan penafsiran-penafsiran. Paradigma pada dasarnya merupakan landasan filosofis yang mendasari suatu ilmu, sehingga lebih lengkap dari pada sejumlah perangkat aturan untuk penelitian. (A.Sonhadji, 1994:117).

Sementara Thomas Kuhn yang dikutip oleh Watson dan Cruik (1978:116), menyatakan bahwa paradigma adalah: "Keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai serta teknik-teknik yang sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu". Bogdan dan Biklen, (1982:32) mengindikasikan bahwa dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, paradigma lebih banyak diartikan sebagai "Kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Gage, (1977:95) menambahkan bahwa yang dimaksud dengan paradigma adalah model-model, pola-pola, atau skema. Paradigma bukanlah teori-teori, namun lebih merupakan cara berpikir atau pola-pola untuk penelitian yang jika diperluas dapat menuju pada pembentukan suatu teori.

Penelitian kualitatif memerlukan pegangan yang disebut paradigma. Stephen (1989:23) menyebutkan bahwa :

The word paradigm come from the Greek. It was Originally a scientific term, and is more commonly used today to mean a model, theory, perception, assumption, or frame of reference. In the more general sense, it's the way we "see" the world-not in terms of our visual sense of sight, but in term of perceiving, understanding, interpreting.

Covey (1978:86) menegaskan bahwa paradigma adalah istilah ilmiah yang lazim digunakan sebagai model, teori, persepsi, asumsi atau kerangka acuan. Dalam arti yang umum covey menjelaskan bahwa paradigma adalah cara "melihat" dunia bukan dengan tindakan melihat, melainkan dengan tindakan mempersepsi, mengerti, menafsirkan. Kemudian dijelaskan juga oleh Covey bahwa "kita melihat dunia, bukan sebagai mana dunia adanya melainkan sebagaimana kita adanya atau sebagaimana kita dikondisikan melihatnya".

Lincoln dan Guba (1985:15) menegaskan bahwa : "*Paradigms represent a distillation of what we think about the world (but cannot prove). Our actions in the world, including actions that we take as inquirers, cannot occur without reference to those paradigm: "As we think, so do we act."*

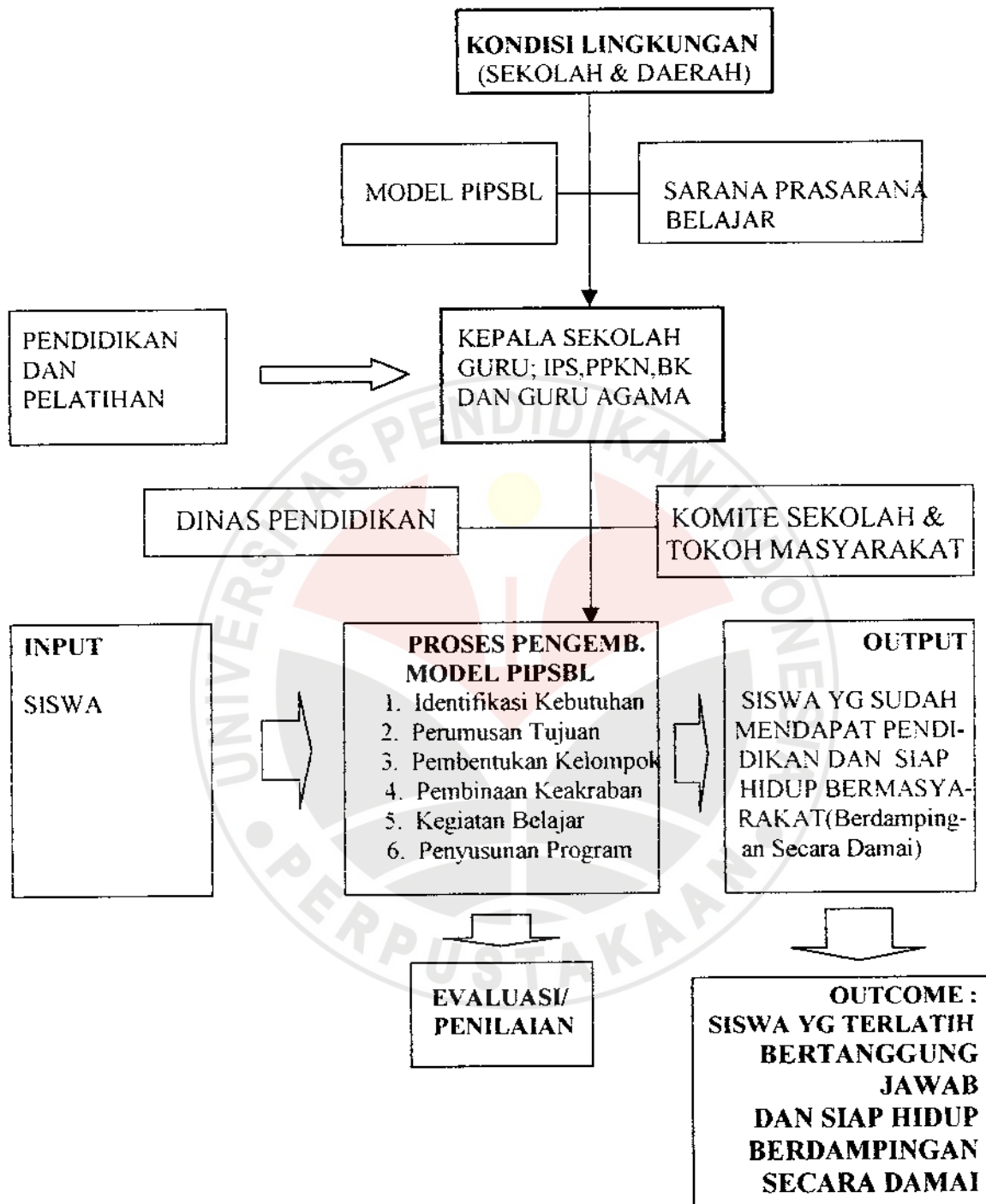
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa paradigma merupakan distilasi atau penyulingan dari apa yang kita pikirkan tentang dunia (tetapi tidak membuktikan). Tindakan di dunia ini, seperti tindakan kita sebagai inquirers, tidak akan terjadi tanpa melalui referensi paradigma tersebut. Begitu kita memikirkan, begitu kita dapat melakukan tindakan. Bogdan dan Biklen (1982:30) menjelaskan bahwa "*A paradigm is a loose collection of logically held-together assumption, concepts, or propositions that orient thinking and research*".

Paradigma merupakan alat bantu bagi para ilmuan dalam merumuskan segala sesuatu yang dipelajari, persoalan apa yang harus dijawab, dan bagaimana menjawabnya serta aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Dengan demikian paradigma adalah seperangkat keyakinan, asumsi, konsep atau proposisi, nilai atau pola pandangan mendasar tentang sesuatu pokok permasalahan yang akan mengarahkan penelitian (Nasution, 1992:32)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa *paradigma* adalah seperangkat pandangan, nilai-nilai kepercayaan tentang dunia sekitar yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu bagi para ilmuan dalam merumuskan sesuatu yang harus dipelajari, persoalan yang harus dipecahkan, serta aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasi apa yang telah diperoleh. Dengan demikian paradigma merupakan panduan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

Untuk memberikan jawaban atau memecahkan permasalahan tentang model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS berikut ini dikemukakan paradigma penelitian sebagai berikut :

Paradigma Penelitian



Gabar 2 : Paradigma Penelitian

H. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bermaksud untuk memberikan batasan-batasan dan untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda mengenai judul masalah, dan variabel penelitian. Untuk itu dalam ruang lingkup ini dikemukakan variabel penelitian dan definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian, sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala-gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata,1983:79). Sejalan dengan itu Suharsimi Arikunto (1991:90) menambahkan bahwa variabel adalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti atau yang menjadi objek penelitian yang dijadikan titik perhatian dari suatu kegiatan penelitian. Sutrisno Hadi (1990:260) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenis maupun dalam tingkatannya.

Berlandaskan pendapat diatas maka yang dimaksudkan dengan variabel dalam penelitian ini adalah sejumlah fenomena, gejala, objek yang bervariasi yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengembangan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS.

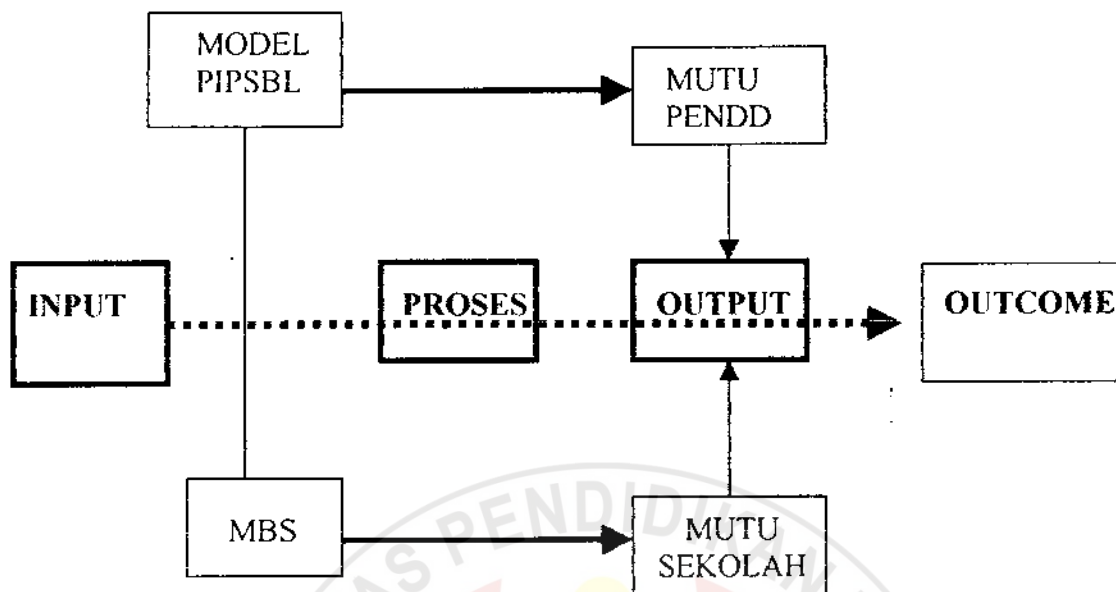
Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas dan Efisiensi Model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS dengan aspek-aspek yang diteliti :
 - a. Menciptakan hidup berdampingan secara damai,
 - b. Meningkatkan intensitas kebersamaan dan sikap saling menghargai
 - c. Menghargai perbedaan adat istiadat
 - d. Menghargai perbedaan pendapat
 - e. Menghargai perbedaan asal-usul,
 - f. Menghargai perbedaan etnik, agama, dan status sosial ekonomi.

2. Model pendidikan IPS berorientasi lingkungan dapat menumbuhkan kecintaan akan nilai-nilai budaya daerah sebagai aspek pembangunan kebudayaan nasional dengan aspek-aspek menurut Balitbang Depdiknas (1999:8) yang diteliti adalah :
 - a. Hak asasi manusia, (demokrasi dan keadilan)
 - b. Etika,estetika dan moral,
 - c. Persatuan dan kesatuan bangsa,(intergrasi),
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - e. Etos kerja,
 - f. Masyarakat madani,
 - g. Bahasa dan sastra,
 - h. Kesehatan dan olahraga.

3. Keikutsertaan masyarakat, dan peranserta Pemerintah dalam Implementasi pengembangan model pendidikan IPS Yang berorientasi lingkungan menurut Depdiknas,(2000) dengan aspek-aspek yang diteliti :
 - a. Pengelolaan sumberdaya sekolah;
 - b. Pengadaan sarana prasarana belajar;
 - c. Hubungan sekolah dengan masyarakat;
 - d. Peningkatan kinerja komite/dewan sekolah;
 - e. Partisipasi orang tua murid.

Variabel Penelitian tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3 : Variabel Penelitian

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini dipandang perlu mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. **Pengembangan** adalah upaya yang terencana dan sistimatis untuk menghasilkan model dalam meningkatkan kualitas suatu proses atau hasil pendidikan. Dalam tulisan ini proses yang sedang berjalan itu adalah proses pengembangan model pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS.
2. **Model.** Menurut Joice dan Weill (1996) model dapat diartikan sebagai “a plan or pattern that we can use to deign face to teaching in classrooms or tutorial settings and to shape instructional material including books, films, tapes,and computer-

mediated program and curriculums (long-term courses of study). Each model guided us as we design instruction to help students achieve various objectives". Joice dan Weill (1996) menambahkan, model juga dapat diartikan sebagai "a simplified description of a system, use as an aid to understanding the system". Model yang dimaksudkan dalam studi ini adalah pola yang dipakai untuk merencanakan dan merancang sistem pendidikan IPS berorientasi lingkungan berdasarkan konsep MBS.

- 3. Pendidikan IPS menurut Gagne, Briggs dan Wager (1992:3)** pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar peserta didik (*instruction is a set of event that affect learner in such a way that learning is facilitated*). Sudjana (2000:8) mengatakan, pendidikan adalah setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (siswa, peserta didik, peserta pelatihan dlsb) yang melakukan kegiatan belajar dengan pendidik (guru, tutor, pelatih, proses, dlsb) yang melakukan kegiatan pembelajaran. Sudjana menambahkan membelajarkan adalah upaya pendidik untuk membantu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan perkataan lain bahwa istilah membelajarkan dapat diberi arti sebagai kegiatan sistematis dan dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar melakukan kegiatan belajar. Ishak Abdulhak (1996) menambahkan pendidikan diartikan sebagai sistem yang alami, dan merupakan sebuah jaringan interaksi antara seorang

pengajar dan warga belajar agar terciptanya proses pendidikan. Shaver (1991: 370) menegaskan pendidikan tidak dapat diartikan secara sederhana sebagai alih informasi dan keterampilan ke dalam benak siswa. Pendidikan yang efektif seyogianya membantu siswa menempatkan diri dalam situasi dimana mereka mampu melakukan konstruksi-konstruksi pemikirannya dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat berdasarkan apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya". **Pendidikan IPS yang dimaksudkan** dalam studi ini adalah pengembangan materi pelajaran yang dilakukan secara meluas dan tidak hanya tergantung kepada buku paket, menggunakan pendekatan siswa aktif, menggunakan berbagai media pengajaran yang relevan, memanfaatkan masyarakat (laboratorium IPS) dan budaya lokal/daerah sebagai sumber belajar.

4. **Berorientasi** yaitu kepentingan pengembangan konsep-konsep lingkungan. Berorientasi dalam studi ini diartikan sama dengan wawasan yaitu pengembangan kurikulum untuk pengembangan lingkungan sebagai sumber belajar IPS dengan menggunakan pendekatan MBS. MBS adalah pendekatan yang sedang melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dari dimensi administrasi pendidikan, yang salah satu keunggulannya memberikan otonomi dalam pengembangan kurikulum berorientasi lingkungan. Oleh karena itu merupakan peluang bagi pendidikan IPS untuk mengembangkan lingkungan sebagai sumber pendidikan. **MBS disebut konsep** karena punya dasar-dasar konseptual filosofik, teoritik, oleh karena itu merupakan sesuatu pola

(raancangan) yang diwujudkan dalam struktur dan kultur manajemen sekolah (Swarna 2002).

5. **Lingkungan** dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UURI No.4 1982:3). Emil Salim (1991:16) mengatakan bahwa **lingkungan hidup** adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Selanjut Nursit (1989:26) menyebutkan lingkungan sebagai semua kondisi, situasi, benda dan makhluk hidup yang ada di sekitar sesuatu makhluk hidup (organisme) yang mempengaruhi peri kehidupan, pertumbuhan dan sifat-sifat atau karakter makhluk hidup tersebut". Dalam konteks ini lingkungan ditekankan pada kajian lingkungan dalam konsep ekologi manusia yang diberi batasan sebagai semua kondisi, situasi, benda dan makhluk hidup yang ada disekitar sekolah yang mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan dan sifat-sifat atau karakternya baik yang bersifat makro maupun yang berbentuk alamiah, sosial budaya dan psikologis. Dalam hal ini dibatasi pada hal-hal yang memiliki keterkaitan erat dengan materi pendidikan IPS di SLTP dan SMU yang berwujud fakta atau peristiwa dan fenomena (Hasan,1996:98). **Lingkungan Alam** adalah kondisi alam atau fisik suatu tempat baik abiotik maupun biotik yang belum banyak dipengaruhi oleh tangan manusia yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia (Nursid,1989:29) **Lingkungan Sosial** adalah pola kehidupan sosial

manusia dalam hubungannya dengan manusia lain baik secara individu maupun secara kelompok (Nursid,1989:29) seperti keluarga, turunan, tetangga, teman, organisasi sosial, masyarakat bangsa dan sebagainya. **Lingkungan Budaya** adalah segala kondisi baik yang berupa materi (benda) maupun non materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas, kreativitas dan penciptaan yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia (Nursid,1989:29). Lingkungan budaya yang berupa materi meliputi : peralatan, senjata, pakaian, mobil dan lain sebagainya. Lingkungan budaya yang berupa non materi meliputi tata nilai, adat istiadat, bahasa, kesenian, nilai, norma peradilan, hukum, sistem politik, sistem hukum dan sebagainya. **Lingkungan Psikologis** adalah suasana psikologis yang melingkupi kehidupan manusia yang bertempat tinggal diwilayah tersebut, seperti suasana lingkungan yang tenang, damai, tentram, aman, tertib, bersih, indah, suasana lingkungan yang gaduh, bising, gerah kotor, menegangkan, ketakutan, brutal dan sebagainya. Kondisi lingkungan psikologis suatu tempat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, bahkan membentuk pola sikap dan karakteristik kehidupan manusia yang bersangkutan.

6. **Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)** adalah suatu sistem pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan atau mengelola pendidikan. (Depdiknas,2001) Manajemen Berbasis Sekolah menawarkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen yang bertumpu ditingkat sekolah. Sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah menjamin semakin rendahnya

kontrol/pengawasan dari Pemerintah Pusat, namun semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sekolah itu untuk mencapai sasaran pembaharuan (berinovasi). Manajemen berbasis sekolah dimaksudkan (Depdiknas,2001) agar :

- 1)Kepala Sekolah memiliki otonomi yang luas dalam mengelola sekolah dan mengalokasikan sumber daya sekolah,
- 2)Kepala sekolah memiliki keterampilan mengelola sekolah dengan baik,
- 3)Memperbesar peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah, dan bertujuan agar ;

- a)Tercapainya efisiensi pengelolaan pendidikan yang diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi,
- b)Meningkatkan mutu pendidikan, yang diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas serta peningkatan profesionalisme guru dan Kepala Sekolah,
- c)Meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui peran serta orang tua murid dalam penyusunan dan pengawasan program.

Keuntungan manajemen berbasis sekolah (Depdiknas,2001) ;

- 1)Sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga mereka lebih terkonsentrasi pada tugas kependidikannya.
- 2)Mendorong profesionalisme kepala sekolah baik dalam perannya sebagai manajer pendidikan maupun sebagai pemimpin sekolah,
- 3)Mendorong guru untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungannya,
- 4)Meningkatkan rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan masyarakat setempat yang menjamin layanan pendidikan terhadap murid dan masyarakat.
- 5)Meningkatkan prestasi



siswa melalui partisipasi orang tua dalam mengawasi langsung proses belajar mengajar anaknya. 6) Masyarakat dapat mengontrol dan Pemerintah dapat memonitoring dalam pengelolaan pendidikan, sehingga sekolah lebih demokratis, transparan dan menghapuskan monopoli pengelolaan pendidikan.

